



Media: Koran Tempo

Hari: Senin

Tanggal: 13 Februari 2017

Halaman: 28

PILKADA YOGYAKARTA

Para Kandidat Sepakat Anti-Politik Uang

"Sejumlah tempat pemungutan suara rawan politik uang dan intimidasi."

Widiarsi Agustina
ninie@tempo.co.id

YOGYAKARTA — Para kandidat kepala daerah yang bersaing dalam pemilihan kepala daerah di Yogyakarta menegaskan komitmen mereka untuk tetap menjunjung tinggi pemilihan damai, juga tidak melakukan praktek politik uang. Komitmen itu disampaikan pasangan Imam Priyono-Achmad Fadli dan Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi saat mengikuti Deklarasi

Jogja Damai pada pilkada 2017 di kantor Komisi Pemilihan Umum Yogyakarta, Sabtu lalu.

"Kami tegas menolak politik uang," kata Imam Priyono saat berpidato dalam deklarasi damai itu sembari melanjutkan, "Pilkada harus bisa dijalankan dengan jujur, adil, dan demokratis." Menurut Imam, pilkada yang demokratis, bermartabat, dan jujur, salah satunya adalah dengan tidak melakukan politik uang. Sikap serupa

juga disampaikan lawan politik Imam, pasangan Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi. Haryadi menegaskan, segala bentuk politik uang sangat mencederai demokrasi. "Masyarakat Yogyakarta adalah pemilih yang cerdas. Kami percaya, masyarakat bisa mengawal pelaksanaan demokrasi dengan baik," kata Haryadi.

Deklarasi anti-politik uang juga digelar di Kulon Progo. Ketua Divisi Penindakan Pelanggaran Panwas Kulon Progo, Tamyus Rochman, mengatakan pihaknya mensinyalir sejumlah pihak di luar peserta pilkada yang melakukan politik uang. Praktek ini mencederai pesta demokrasi di wilayah ini. "Kami berharap hasil dari deklarasi menolak politik uang ini adalah komitmen bersama semua pihak, sehingga pilkada Kulon Progo terselenggara penuh integritas, aman, damai, dan kondusif. Tolak uang, lapor! Takutnya!" kata Tamyus.

Iriani, calon wakil bupati dari pasangan nomor urut 1 di Kulon Progo, menilai deklarasi menolak politik uang sangat terlambat. Seharusnya kegiatan deklarasi menolak politik uang dilakukan sejak awal kampanye. "Deklarasi ini sudah terlambat. Seharusnya pan-

was melakukan sosialisasi definisi politik uang seperti apa kepada masyarakat," katanya.

Panitia Pengawas Pemilu Yogyakarta berulang kali mengingatkan, praktek politik uang rawan terjadi di sejumlah tempat pemungutan suara. Anggota Divisi Pencegahan Badan Pengawas Pemilu Yogyakarta, Iwan Ferdian Susanto, mengatakan setidaknya 66 dari 796 TPS di Yogyakarta diindikasikan terkena kejahatan ini. Iwan mengatakan, pemetaan mengacu pada sejumlah indikasi yang dibuat Bawaslu. "Berkaca dari Pileg 2014, ada politik

uang dan sikap pragmatis pemilih," kata Iwan.

Menurut Iwan, TPS yang rawan politik uang umumnya dekat dengan tempat tinggal tokoh masyarakat, pejabat daerah, dan pengusaha. Dia menyebut sejumlah kawasan, misalnya di Bactro dan kawasan Mandala Krida. TPS rawan juga berada di basis massa pasangan calon inkumben.

Politik uang, kata Iwan, bisa berupa uang maupun barang yang diberikan oleh calon maupun tim sukses calon kepada pemilih. Pemetaan TPS rawan politik uang itu merupakan hasil pantauan Panwas.

● SPONTA III | ANTARA

Instansi

1. KPU Kota Yogyakarta
2. Panwas
3.
4.
5.

Tindak Lanjut

Ditanggapi
Diketahui
Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005